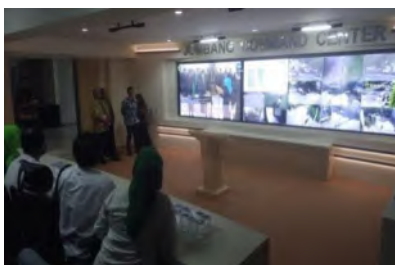




RENCANA STRATEGIS

Tahun 2018 - 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Jombang dapat menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018 - 2023.

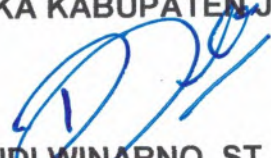
Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang periode 2018-2023 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo untuk 5 (lima) tahun ke depan sehingga pencapaiannya bisa terukur. Renstra disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra perubahan periode 2017-2018, analisa atas pendapat para pemangku kepentingan (*stakeholders*), analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global maupun nasional.

Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Jombang memberikan pedoman bagi semua unit kerja, pimpinan dan staf di lingkungan Dinas Kominfo untuk melaksanakan secara akuntabel yang berorientasi pada peningkatan kinerja untuk menjamin keberhasilan program dan kegiatan untuk mewujudkan visi Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang 2018-2023 yaitu "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional dalam Rangka Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing".

Akhirnya Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Jombang sebagai dokumen perencanaan yang akan dijadikan acuan untuk lima tahun kedepan (2018 - 2023) serta menjadi komitmen segenap pegawai dilingkup Dinas Kominfo Kabupaten Jombang untuk melaksanakan tugasnya secara optimal yang akhirnya bermuara pada kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Jombang menjadi lebih baik.

Jombang, 10 Oktober 2018

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN JOMBANG**



BUDI WINARNO, ST, M.Si

Pembina

NIP. 19741001 199901 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	5
2.1 Tupoksi	5
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	17
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	30
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	32
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	32
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Progam Bupati Terpilih	32
3.3 Telaah Renstra K/L	35
3.4 Telaah RTRW dan KLHS	37
3.5 Penentuan Isu Strategis	38
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	39
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	41
BAB VI RENCANA PROGAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	46
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	59
BAB VIII PENUTUP	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Didalam undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Nasional, mengamanahkan bahwa semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan untuk menyusun perencanaan yang baik dan benar. Olehnya itu untuk menyusun perencanaan yang benar tentunya harus didasarkan pada profil OPD seperti Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang selanjutnya dianalisa lalu dituangkan dalam program dan kegiatan yang disertai pengalokasian dana yang memadai dan rasional dari anggaran APBD kabupaten.

Rencana strategi (Renstra) ini diharapkan dapat memberikan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang, selain itu Renstra ini dimaksudkan untuk menerjemahkan visi – misi, program, dan kebijakan Bupati Jombang dalam bidang komunikasi dan informatika sehingga kesuksesan kepemimpinan Bupati Jombang dalam sektor komunikasi dan informatika selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan merupakan performa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang itu sendiri.

Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (Lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Renstra merupakan suatu dokumen perumusan dari keseluruhan tahap perencanaan pembangunan daerah, sehingga salah satu dokumen rujukan awal dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2018 – 2023 menyusun Renstra OPD adalah rancangan awal RPJMD yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh OPD selama 5 (Lima) tahun baik untuk mendukung visi/misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi OPD.

Renstra kementerian/lembaga (K/L) dan Renstra provinsi/kabupaten/kota merupakan sebagai tolak ukur dalam pencapaian kinerja RenstraOPD. Jika capaian RenstraOPD melebihi sasaran rencana strategi kementerian/lembaga (K/L) dan Renstra provinsi maka, hal ini menunjukkan bahwa kinerja OPD sudah baik secara

nasional/provinsi. Sedangkan jika lebih rendah maka hal ini mengindikasikan bahwa OPD tersebut memiliki permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan seperti dalam perencanaan program, kegiatan dan pendanaan, sumberdaya penyelenggaraan pendanaan, prosedur mekanisme pelayanan, dan strategi pelayanan yang ditempuh.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kab. Jombang Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Adapun maksud dari penyusunan renstra adalah :

1. Sebagai pedoman arah pembangunan dibidang penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang, Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik, Bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi, dan Bidang Layanan e-Government.
2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan di

Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik, Bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi, dan Bidang Layanan e-Government.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2018– 2023 adalah:

1. Menjadi acuan dalam penyusunan program kerja setiap 5 (lima) tahun ke depan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang.
2. Merumuskan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang.
3. Menyusun program strategi yang dijabarkan berdasarkan Arah Kebijakan Umum dan program Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2018 - 2023 sesuai kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang.
4. Sebagai dasar atau pedoman perencanaan tahunan dan kebutuhan anggaran.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

RenstraDinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tupoksi
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 3.2 Telaah Visi, Misi, dan Progam Bupati Terpilih
- 3.3 Telaah Renstra K/L
- 3.4 Telaah RTRW dan KLHS
- 3.5 Penentuan Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2018 tentang Kedudukan, susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat dengan 2 (Dua) Sub Bagian yaitu :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Progan dan Evaluasi
- 3) Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik 2 (dua) seksi, yaitu :
 - a. Seksi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi
 - b. Seksi Kemitraan Komunikasi dan Informasi Publik
- 4) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - a. Seksi Infrastruktur, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi
 - b. Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi
- 4) Bidang Pengelolaan e- Government 2 (Dua) Seksi yaitu :
 - a. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Ekosistem e-Government
 - b. Seksi Tata Kelola e-Government

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

- a). Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- b). Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- c). Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;

- d). Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
- e). Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika; bidang statistik dan bidang persandian;
- f). Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian; dan
- g). Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset, penyusunan program dan evaluasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. Pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - e. Pengelolaan aset;
 - f. Pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran, dan perundang-undangan;
 - h. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
 - i. Pengelolaan kearsipan;
 - j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional;
- b. Melaksanakan administrasi Kepegawaian, pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier;

- c. Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga, keprotokolan, perjalanan dinas dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat);
- d. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan kantor;
- e. Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup Dinas;
- f. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepustakaan;
- g. Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur;
- h. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

4. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penatausahaan keuangan, meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi/pemubukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- b. Melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
- c. Menyusub, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan anggaran;
- d. Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barang-barang inventaris kantor;
- e. Melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

5. Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi

Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi, mempunyai tugas :

- a. Menghimpun, mengolah, mengkaji dan meneliti data dalam rangka penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan penyusunan pembangunan;
- c. Melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka analisis dan penilaian pelaksanaan program dan anggaran;
- e. Melaksanakan kebijakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan;

- f. Melaksanakan pembuatan umpan balik hasil penyusunan dan penetapan anggaran guna perencanaan dan penetapan anggaran guna perencanaan program dan anggaran untuk tahun berikutnya;
- g. Melaksanakan supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

6. Bidang Pengelolaan Komunikasi Dan Informasi Publik

- (1) Bidang Pengelolaan Komunikasi Dan Informasi Publik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang pengelolaan komunikasi publik dan pengelolaan informasi publik
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik, Mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyediaan akses informasi, pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah, serta pelayanan informasi publik;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penyediaan akses informasi, pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah, serta pelayanan informasi publik;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyediaan akses informasi, pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah, serta pelayanan informasi publik;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyediaan akses informasi, pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah, serta pelayanan informasi publik;

- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyediaan akses informasi, pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah, serta pelayanan informasi publik;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

7. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik

Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, dan pengelolaan komunikasi publik;
- b. Melaksanakan pembinaan dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- c. Menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial) dan pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat);
- d. Melaksanakan pengelolaan opini dan aspirasi publik serta pengelolaan aduan masyarakat;
- e. Menyelenggarakan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah;
- f. Melaksanakan pengelolaan saluran komunikasi milik daerah / media internal;
- g. Melaksanakan pengelolaan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah;
- h. Menyusun pedoman teknis dan standar operasional prosedur di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, dan pengelolaan komunikasi publik;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, dan pengelolaan komunikasi publik; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pengelolaan Komunikasi Dan Informasi Publik.

8. Seksi Pengelolaan Informasi Publik

Seksi Pengelolaan informasi Publik, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah, serta pelayanan informasi publik;

- b. Menyelenggarakan layanan perencanaan informasi publik dan citra positif pemerintah daerah;
- c. Melaksanakan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal, serta pembuatan konten lokal;
- d. Melaksanakan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah;
- e. Menyelenggarakan layanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi;
- f. Melaksanakan pembinaan, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi di bidang penyediaan konten lintas sektoral, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah, serta pelayanan informasi publik;
- g. Menyusun pedoman teknis dan standar operasional prosedur di bidang penyediaan konten lintas sektoral, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah, serta pelayanan informasi publik;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah, serta pelayanan informasi publik; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Dan Informasi Publik.

9. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

- (1) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang infrastruktur, keamanan komunikasi dan telekomunikasi, serta pengelolaan data dan integrasi sistem informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana maksud pada ayat (1), Bidang Telematika, mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang infrastruktur, keamanan informasi dan telekomunikasi, serta pengelolaan data dan integrasi sistem informasi;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur, keamanan informasi dan telekomunikasi, serta pengelolaan data dan integrasi sistem informasi;
 - c. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang infrastruktur, keamanan informasi dan telekomunikasi, serta pengelolaan data dan integrasi sistem informasi;

- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur, keamanan informasi dan telekomunikasi, serta pengelolaan data dan integrasi sistem informasi;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur, keamanan informasi dan telekomunikasi, serta pengelolaan data dan integrasi sistem informasi;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

10. Seksi Infrastruktur, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi

Seksi Infrastruktur, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar, Data Center Disaster Recovery Center dan teknologi informasi komputer, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, serta keamanan informasi dan telekomunikasi;
- b. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang layanan infrastruktur dasar, Dasar Center, Disaster Recovery Center dan teknologi informasi komputer, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, serta keamanan informasi dan telekomunikasi
- c. Menyelenggarakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC);
- d. Menyelenggarakan layanan pengembangan dan inovasi teknologi informasi komputer dalam implementasi e-Government;
- e. Menyelenggarakan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik; interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah, serta filterisasi terhadap konten negatif;
- f. Melaksanakan monitoring trafik elektronik, dan layanan penanganan insiden keamanan informasi;
- g. Menyelenggarakan layanan keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah;
- h. Melaksanakan audis teknologi informasi dan komunikasi, serta penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
- i. Menyelenggarakan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah;

- j. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informatika, Government Cloud Computing, serta keamanan informasi;
- k. Menyelenggarakan layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintah;
- l. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan frekwensi sinyal transmiter, spectrum radio dan orbit satelit;
- m. Mengirim, menerima dan menyampaikan berita sandi dan telekomunikasi dari dan untuk lembaga atau pimpinan instansi terkait;
- n. Membina, mengembangkan dan memelihara alat-alat sandi dan telekomunikasi sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah
- o. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dan evaluasi di bidang infrastruktur, keamanan informasi dan komunikasi ; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi.

11. Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi

Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan di bidang manajemen data informasi e-Government, serta integrasi layanan publik dan pemerintahan;
- b. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang manajemen data informasi e-Government, serta integrasi layanan publik dan pemerintahan;
- c. Menyelenggarakan layanan penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan;
- d. Menyelenggarakan layanan manajemen data informasi e-Government, serta layanan recovery data dan informasi;
- e. Melaksanakan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
- f. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik;
- g. Menyelenggarakan layanan interoperabilitas, serta layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan;

- h. Menyelenggarakan layanan pusat Application Programe Interface (API) daerah;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang pengelolaan data dan integrasi sistem informasi; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

12. Bidang Layanan e-Government

- (1) Bidang Layanan e-Government mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang pengembangan aplikasi, ekosistem, dan tata kelola e-Government.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Bidang Layanan e-Government mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan aplikasi, ekosistem, dan tata kelola e-Government;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan aplikasi, ekosistem, dan tata kelola e-Government;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan aplikasi, ekosistem, dan tata kelola e-Government;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan aplikasi, ekosistem, dan tata kelola e-Government;
 - e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan aplikasi, ekosistem, dan tata kelola e-Government;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

13. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Ekosistem e-Government

Seksi Pengembangan Aplikasi dan Ekosistem e-Government, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan di bidang pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik, dan penunjang yang terintegrasi, serta pengembangan ekosistem e-Government;
- b. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik, dan penunjang yang terintegrasi, serta pengembangan ekosistem e-Government;
- c. Menyusun rencana kebutuhan sistem aplikasi;

- d. Melaksanakan kerjasama, rekayasa, pembuatan, pengembangan, dan pemeliharaan sistem aplikasi pemerintah dan pelayanan publik yang terintegrasi;
- e. Menyusun standarisasi sitem aplikasi;
- f. Menyelenggarakan layanan pengembangan Business Process Re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder Smart City);
- g. Menyelenggarakan layanan Sistem Informasi Smart City, layanan interaktif pemerintah dan masyarakat, serta penyediaan sarana dan sarana pengendalian Smart City;
- h. Melaksanakan pengelolaan domain dan sub domain pemerintah yang meliputi pengelolaan domain dan sub domain pemerintah daerah, pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah, menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, menetapkan dan mengubah nama pejabat domain, menetapkan dan mengubah nama domain dan sub domain, serta menetapkan tata kelola nama domain dan sub domain;
- i. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dalam pengelolaan domain, portal dan website;
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan aplikasi dan ekosistem e-Government; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Layanan e-Government.

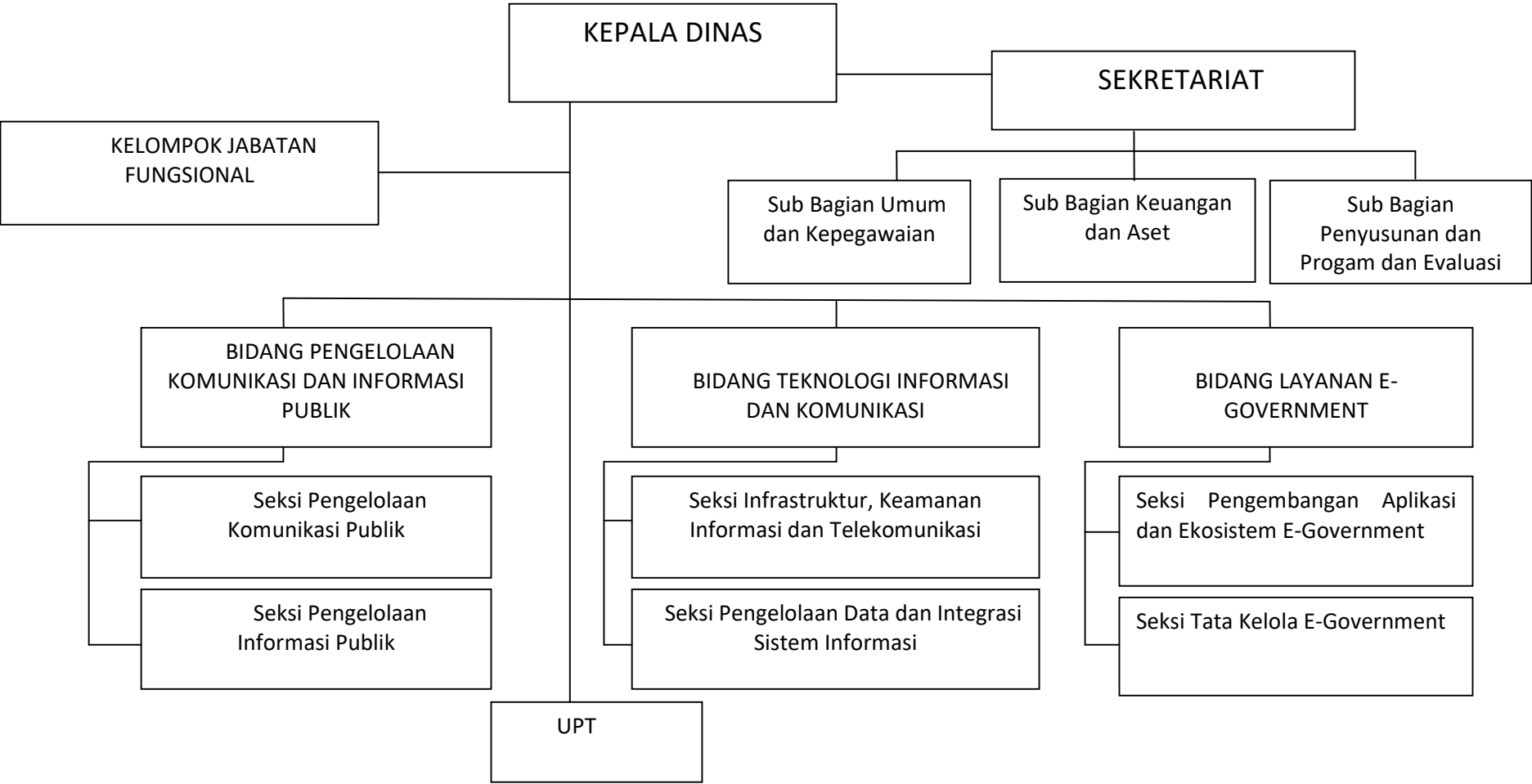
14. Seksi Tata Kelola e –Government

Seksi Tata Kelola e-Government, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan e-Government pemerintah daerah, Government Chief Information Officer (GCIO) serta pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah;
- b. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan e-Government pemerintah daerah, Gouvernment Chief Information Officer (GCIO) serta pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah;

- c. Melaksanakan koordinasi kerja sama lintas organisasi perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan pusat serta non pemerintah;
- d. Melaksanakan integrasi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan e-Government pemerintah daerah;
- e. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- f. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-Government dan Smart City;
- g. Melaksanakan promosi pemanfaatan layanan Smart City;
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang penyelenggaraan e-Government pemerintah daerah, Government Chief Information Officer (GCIO) serta pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Layanan e-Government.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JOMBANG



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah pegawai dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang sebanyak 43 orang dengan rincian sebagai berikut:

a. Komposisi Status Kepegawaian:

No	Status	Jumlah
1	PNS	30orang
2	Pegawai Tidak Tetap	13 orang
	Jumlah	43orang

b. Komposisi Eselon PNS

No.	Eselon PNS	Jumlah
1	Eselon II.b	1 orang
2	Eselon III.a	1 orang
3	Eselon III.b	3 orang
4	Eselon IV.a	9 orang
5	Staf	16 orang
	Jumlah	30orang

c. Komposisi Pendidikan PNS

No.	Pendidikan PNS	Jumlah
1	SMP	2 orang
2	SMA/ SMK	7 orang
3	D1/D2/D3	2 orang
4	S1	11 orang
5	S2	8 orang
	Jumlah	30 orang

d. Komposisi Pendidikan Pegawai Tidak Tetap:

No.	Pendidikan PNS	Jumlah
1	SMP	1 orang
2	SMA/ SMK	4 orang
3	D1/D2/D3	1 orang
4	S1	6 orang
5	S2	1 orang
	Jumlah	13 orang

e. Komposisi Umur PNS:

No.	Pendidikan PNS	Jumlah
1	<25th	-
2	25–30th	1 orang
3	31–40th	9 orang
4	41–50th	12 orang
5	51–56th	8 orang
6	>57th	-
	Jumlah	30 orang

f. Komposisi Umur Pegawai Tidak Tetap

No.	Pendidikan Pegawai Tidak Tetap	Jumlah
1	<25th	1 orang
2	25–30th	2 orang
3	31–40th	9 orang
4	41–50th	-
5	51–56th	1 orang
6	>57th	-
	Jumlah	13 orang

g. Komposisi Umur PNS Menurut Gender

	Pegawai Menurut Gender	Jumlah
1	Laki-Laki	19 orang
2	Perempuan	11 orang
	Jumlah	30 orang

h. Komposisi Umur Pegawai Tidak Tetap Menurut Gender

	Pegawai Menurut Gender	Jumlah
1	Laki-Laki	8 orang
2	Perempuan	5 orang
	Jumlah	13 orang

Adanya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana kerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang dalam unsur pendanaan dalam kondisi cukup, demikian pula ketersediaan sarana dan prasarana. Adapun sarana prasarana yang tersedia sebagai berikut:

TABEL 2.1
ASET DINAS KOMINFO KABUPATEN JOMBANG

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
1	Tanah Bang. Kantor Pemerintah	2	2	Baik	0 Kurang Baik
2	Portable Compresor	1	1	Baik	0 Kurang Baik
3	Transportable Generating	1	1	Baik	0 Kurang Baik
4	Portable Generating Set	1	1	Baik	0 Kurang Baik
5	Stationary Generating set	1	1	Baik	0 Kurang Baik
6	Pompa Air	1	1	Baik	0 Kurang baik
7	Station Wagon	4	4	Baik	0 Kurang Baik
8	Truck	1	1	Baik	0 Kurang Baik
9	Sepeda Motor	9	8	Baik	1 Rusak Berat
10	Sepeda Motor Gerobak	1	1	Baik	0 Kurang Baik
11	Mesin Bubut	1	1	Baik	0 Kurang Baik
12	Multisester Digital	1	1	Baik	0 Kurang Baik
13	Global Positioning System	1	1	Baik	0 Kurang Baik
14	Mesin Tik Man	3	1	Baik	2 Kurang Baik
15	Mesin Tik Man Long	2	2	Baik	0 Kurang Baik
16	Mesim Tik Eletronik	1	1	Baik	0 Kurang Baik
17	Almari Besi / Metal	4	4	Baik	0 Kurang Baik
18	Rak Besi / Metal	32	32	Baik	0 Kurang Baik
19	Rak Kayu	1	1	Baik	0 Kurang Baik
20	Filling Besi / Metal	17	17	Baik	0 Kurang Baik
21	Brandkas	1	1	Baik	0 Kurang Baik
22	Lemari Kaca	6	6	Baik	0 Kurang Baik
23	Fillling Plastik	2	2	Baik	0 Kurang Baik
24	Alat Penghancur Kertas	4	4	Baik	0 Kurang Baik
25	Papan Nama Instansi	4	4	Baik	0 Kurang Baik
26	Alat Pemotong Kertas	1	1	Baik	0 Kurang Baik
27	Lemari Kayu	7	7	Baik	0 Kurang Baik
28	Rak Kayu	1	1	Baik	0 Kurang Baik
29	Meja Kayu / Rotan	3	3	Baik	0 Kurang Baik
30	Zice	2	2	Baik	0 Kurang Baik
31	Meja Tulis	39	38	Baik	1 Kurang Baik
32	Meja Resepsionis	2	2	Baik	0 Kurang Baik
33	Meja Panjang	1	1	Baik	0 Kurang Baik
34	Kursi Rapat	27	27	Baik	0 Kurang Baik
35	Kursi Tangan	4	4	Baik	0 Kurang Baik
36	Kursi Putar	19	19	Baik	0 Kurang Baik
37	Kursi Biasa	33	33	Baik	0 Kurang Baik
38	Bangku Tunggu	1	1	Baik	0 Kurang Baik
39	kursi Lipat	1	1	Baik	0 Kurang Baik
40	Meja Komputer	11	11	Baik	0 Kurang Baik
41	Sofa	2	2	Baik	0 Kurang Baik
42	Korden	2	2	Baik	0 Kurang Baik
43	Karpet	3	3	Baik	0 Kurang Baik
44	M. Penghisap Debu	2	2	Baik	0 Kurang Baik
45	M. Potong Rumput	1	1	Baik	0 Kurang Baik
46	Lemari Es	1	1	Baik	0 Kurang baik

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
47	Ac Unit	8	8	Baik	0 Kurang baik
48	Ac Split	18	18	Baik	0 Kurang Baik
49	Kipas Angin	2	2	Baik	0 Kurang Baik
50	Exhauster Fan	9	9	Baik	0 Kurang Baik
51	Alat pendingin Lainnya	2	2	Baik	0 Kurang Baik
52	Kitchen Set	4	4	Baik	0 Kurang Baik
53	Radio	5	5	Baik	0 Kurang Baik
54	Televisi	7	7	Baik	0 Kurang Baik
55	Ampilifier	3	3	Baik	0 Kurang Baik
56	Sound System	21	21	Baik	0 Kurang Baik
57	Compact Disk	1	1	Baik	0 Kurang Baik
58	Microphone	10	10	Baik	0 Kurang Baik
59	Microphone Floor Stand	5	5	Baik	0 Kurang Baik
60	Unit Power Supply	90	90	Baik	0 Kurang Baik
61	Stabilizer	3	3	Baik	0 Kurang Baik
62	Camera Video	5	5	Baik	0 Kurang Baik
63	G.Presiden / Wk.Presiden	1	1	Baik	0 Kurang Baik
64	Tangga Alumunium	1	1	Baik	0 Kurang Baik
65	Dispencer	2	2	Baik	0 Kurang Baik
66	Handy Cam	2	2	Baik	0 Kurang Baik
67	Alat Pemadam Portable	8	8	Baik	0 Kurang Baik
68	Internet	1	1	Baik	0 Kurang Baik
69	P.C Unit	136	136	Baik	0 Kurang Baik
70	Lap Top	9	9	Baik	0 Kurang Baik
71	Note Book	16	16	Baik	0 Kurang Baik
72	Hardisk	9	9	Baik	0 Kurang Baik
73	Disk Pack	1	1	Baik	0 Kurang Baik
74	Printer	26	25	Baik	1 Kurang Baik
75	Cpu	5	5	Baik	0 Kurang Baik
76	Monitor	1	1	Baik	0 Kurang Baik
77	Scanner	2	1	Baik	1 Kurang Baik
78	Plotter	1	1	Baik	0 Kurang Baik
79	External	3	3	Baik	0 Kurang Baik
80	Peralatan Personal Komp. Lainnya	210	210	Baik	0 Kurang Baik
81	CD/DVD RW	3	3	Baik	0 Kurang Baik
82	Server	18	18	Baik	0 Kurang Baik
83	Router	8	8	Baik	0 Kurang Baik
84	Hub.	66	66	Baik	0 Kurang Baik
85	Modem	1	1	Baik	0 Kurang Baik
86	Peralatan Jaringan Lainnya	257	257	Baik	0 Kurang Baik
87	Card Wirelaess LAN	6	6	Baik	0 Kurang Baik
88	Acces Point	135	135	Baik	0 Kurang Baik
89	Software	10	10	Baik	0 Kurang Baik
90	Meja Kerja Pejabat Eselon Iii	1	1	Baik	0 Kurang Baik
91	Meja Kerja Pejabat Eselon Iv	3	3	Baik	0 Kurang Baik
92	Kursi Kerja Pejabat Eselon Iii	2	2	Baik	0 Kurang Baik
93	Kursi Kerja Pejabat Eselon Iv	3	3	Baik	0 Kurang Baik
94	Lemari & Arsip Pejabat Lainnya	1	1	Baik	0 Kurang Baik

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
95	Camera + Attachment	61	61	Baik	0 Kurang Baik
96	Proyektor + Attachment	9	9	Baik	0 Kurang Baik
97	Audio Monitor Active	1	1	Baik	0 Kurang Baik
98	Compact Disk Player	1	1	Baik	0 Kurang Baik
99	Telephone Hybrid	3	3	Baik	0 Kurang Baik
100	Audio Compresor	1	1	Baik	0 Kurang Baik
101	Unintemuptible P.S.(Ups)	1	1	Baik	0 Kurang Baik
102	Peralatan Studio visual	8	8	Baik	0 Kurang Baik
103	MPS	5	0	Baik	5 Kurang Baik
104	Camera Electric	1	1	Baik	0 Kurang Baik
105	Tripod camera	1	1	Baik	0 Kurang Baik
106	Lensa Camera	2	2	Baik	0 Kurang Baik
107	Mixer Pvc	5	5	Baik	0 Kurang Baik
108	Peralatan Studio Video & Film	5	5	Baik	0 Kurang Baik
109	Kompas	1	1	Baik	0 Kurang Baik
110	Peralatan Pemetaan ukur	1	1	Baik	0 Kurang Baik
111	Transceiver/Transm. Uhf	1	1	Baik	0 Kurang Baik
112	Telephone (Pabx)	152	152	Baik	0 Kurang Baik
113	Stand Speaker	2	2	Baik	0 Kurang Baik
114	Mixer	1	1	Baik	0 Kurang Baik
115	Tape Recorder	1	1	Baik	0 Kurang Baik
116	Handy Talky	14	11	Baik	3 Kurang Baik
117	Facsimile	2	2	Baik	0 Kurang Baik
118	Alat Komunikasi Telp. Lainnya	4	4	Baik	0 Kurang Baik
119	Unit Transcelver Hf Portable	3	3	Baik	0 Kurang Baik
120	Alat Komunikasi Radio HF/FM Lainnya	2	2	Baik	0 Kurang Baik
121	Repeater	1	1	Baik	0 Kurang Baik
122	Unit Pemancar Vhf/Fm Port	4	4	Baik	0 Kurang Baik
123	Unit Pemancar Vhf/Fm Lainnya	2	2	Baik	0 Kurang Baik
124	Antene Vhf/ Fm Portable	2	2	Baik	0 Kurang Baik
125	Peralatan Antena VHF/Fm	2	2	Baik	0 Kurang Baik
126	Antene Uhf Portable	3	3	Baik	0 Kurang Baik
127	Peralatan Antena UHF Lainnya	4	4	Baik	0 Kurang Baik
128	Guy Tower	1	1	Baik	0 Kurang Baik
129	Concrete Tower	1	1	Baik	0 Kurang Baik
130	Switches/ Menara Antena Lainnya	64	64	Baik	0 Kurang Baik
131	Receiver Stl/ uhf	1	1	Baik	0 Kurang Baik
132	Antene Penerima Vhf	82	82	Baik	0 Kurang Baik
133	Gedung Kantor Permanen	4	4	Baik	0 Kurang Baik
134	Ged.Pos Jaga Permanen	1	1	Baik	0 Kurang Baik
135	Ged.Grs/Pool Permanen	1	1	Baik	0 Kurang Baik
136	Inst.Grd.Distr.Kap.Sedang	6	6	Baik	0 Kurang Baik
137	Jrn.Distr.Teg.Dibawah 1 K	1	1	Baik	0 Kurang Baik
138	Jaringan Distribusi Lainnya	1	1	Baik	0 Kurang Baik
139	Jaringan Telepon Di Atas Tanah Lainnya	3	3	Baik	0 Kurang Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas pada tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Periode sebelumnya. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang meliputi:

1. Pemeliharaan dan Pengelolaan website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang

Pemerintah Kabupaten Jombang memiliki website pemerintah daerah yang menyajikan informasi terbaru mengenai kegiatan dan pembangunan pemerintah daerah, hal ini dimaksudkan sebagai sarana sosialisasi pemerintah daerah kepada masyarakat yang berisi informasi- informasi yang berkaitan dengan segala aspek. Fasilitas akses informasi berbasis TIK untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat melalui situs www.jombangkab.go.id. Melalui kegiatan ini, dihadirkan pula content baru yang dapat memberikan informasi yang lebih mutakhir mengenai kegiatan dan prestasi pemerintah daerah Kabupaten Jombang.

Di Kabupaten Jombang sejak tahun 2003 website pemda sudah disentralkan di Bagian Humas Kabupaten Jombang yang selanjutnya dialihkan ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang sejak awal tahun berjalan 2017 dengan alamat www.jombangkab.go.id. Selain halaman utama, terdapat pula sub domain sebanyak 31, sub page 57, dan sub page dinkes.jombangkab.com sebanyak 25, sub domain dan sub page dikelola oleh masing-masing OPD Kabupaten Jombang sesuai tugas pokok dan fungsinya. Pengelolaan (penambahan konten dan sub domain) dan Pemutakhiran Informasi website ini berada pada kegiatan Pemeliharaan website www.jombangkab.go.id.

2. Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi atau PPID di Kabupaten Jombang menduduki jabatannya bertugas dan bertanggung jawab mengelola informasi dan dokumentasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang yang dibentuk pada tahun 2012 yang sebelumnya dibentuk oleh Bagian Humas Kabupaten Jombang. PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik di Pemerintah Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Jombang sesuai dengan tupoksinya, mengelola 1 PPID utama dan pengelolaan informasi PPID di website di PPID.jombangkab.go.id.

3. Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat

Kelompok Informasi Masyarakat atau KIM adalah kelompok yang dibentuk dari dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat. Tugas KIM untuk mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan informasi khususnya yang berkenaan dengan potensi wilayah sekitarnya.

Kabupaten Jombang mengikuti pekan KIM Jawa Timur yang diselenggarakan setiap 2 tahun sekali dengan berpartisipasi dalam pameran yang menyajikan informasi dan mempromosikan mengenai produk-produk unggulan binaan kelompok informasi masyarakat. KIM juga membina Pertunjukan Rakyat (Pertura) untuk mengikuti festival yang rutin diadakan oleh Provinsi.

4. Pengembangan Data Statistik Berupa Cetak dan Pendistribusian Buku Data dan Informasi Sektor Kabupaten Jombang dan Sektor Kecamatan

Ketersediaan data dan statistik yang akurat sangat diperlukan dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah ke depan. Dengan data yang akurat dan detail, diharapkan arah pembangunan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan visi misi kepala daerah dan sejalan dengan arah kebijakan Nasional. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang memberikan informasi data-data statistik tentang kependudukan diseluruh Kabupaten Jombang yang meliputi tentang usia, pendidikan, jenis kelamin, pekerjaan dan beberapa hal lainnya, data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang. Data tersebut dicetak berupa buku data dan informasi sektoral Kabupaten Jombang dan Sektoral Kecamatan yang selanjutnya didistribusikan diseluruh OPD dan Kecamatan di Kabupaten Jombang.

5. Cetak dan Pendistribusian Majalah Massa dan Arimbi

Majalah Massa dan Arimbi merupakan sarana pelayanan informasi Pemerintah Kabupaten Jombang melalui media cetak. Tujuan dari adanya Majalah Massa dan Arimbi adalah untuk memberikan berbagai macam informasi, khususnya yang terjadi di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang. Selain memberikan informasi tentang pemerintah Kabupaten Jombang, Majalah Massa dan Arimbi memberikan berbagai macam informasi

terkait kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Jombang.

Penerbitan Majalah Massa dan Arimbi merupakan salah satu sarana strategis sebagai jembatan antara OPD, Pemerintah dan Masyarakat, agar program dan kebijakan pemerintah dapat tersebar secara luas dan merata. Isi berita dari majalah Massa dan Arimbi selain berkaitan tentang berita Pemerintah Kabupaten Jombang, mengangkat juga tentang aspirasi masyarakat, kuliner, kebudayaan, dan pariwisata, prestasi-prestasi yang diraih Kabupaten Jombang, sosok berprestasi dan pekerja yang terlupakan jasanya namun memiliki peran yang penting bagi kehidupan.

6. Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan agar peserta diharapkan menambah informasi pengetahuan tentang masalah cukai, merupakan hal yang wajib di ketahui bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Jombang meliputi masyarakat, dan para pelaku usaha dan pasar diseluruh desa, dan kecamatan di Kabupaten Jombang yang cukup strategis secara ekonomis, maupun kultur sosial budaya.

7. Dialog Interaktif Warung Pojok Kebon Rojo

Berdasarkan keterbukaan informasi publik untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang mengadakan rutin kegiatan dialog interaktif dan solutif yang setiap bulannya diadakan 3 sampai dengan 4 kali. Kegiatan dialog interaktif dan solutif dikemas dalam perbincangan atau percakapan dengan topik yang dipilih menghadirkan narasumber.

8. Publikasi Informasi Melalui Radio

Meskipun perkembangan teknologi informasi sudah semakin pesat, namun keberadaan radio sebagai wahana penyebar informasi kepada masyarakat masih diakui eksistensinya. Publikasi informasi pada kegiatan ini dilakukan melalui radio Pemerintah Kabupaten Jombang yaitu Suara Jombang FM (SJFM) berupa siaran radio setiap hari pada tahun berjalan. Program-program di SJFM meliputi:

1. Informasi yaitu perbincangan isu nasional dan reportase tim liputan. Topik

perbincangan dengan interaktif kepada masyarakat dengan membuka line telepon, Whatsapp dan sms untuk interaktif pendengar.

2. Talkshow Interaktif

3. Pada bulan Ramadhan disiarkan progam acara mutiara ramadhan. Diharapkan program- program pemerintah daerah dapat lebih maksimal terpublikasi kepada masyarakat melalui radio.

i. Pengelolaan Persandian

Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang yaitu dengan melaksanakan pencatatan / agenda berita-berita / radiogram baik yang diterima ataupun yang dikirim dari baik pusat maupun provinsi, Badan Siber dan Sandi Negara (www.bssn.go.id), untuk dilanjutkan ke Bagian Umum dan Instansi Terkait.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Jombang

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Meningkatnya pengembangan komunikasi dan informatika	-	-	-	76 %	81 %	87 %	93 %	93 %	76 %	81 %	87 %	93 %	93 %	76 %	81 %	87 %	93 %	93 %
2	Meningkatnya pengembangan dan pelayanan informasi publik	-	-	-	76 %	81 %	87 %	93 %	93 %	76 %	81 %	87 %	93 %	93 %	76 %	81 %	87 %	93 %	93 %
3	Persentase penyediaan data statistik untuk perencanaan daerah	-	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Meningkatnya informasi ketentuan di bidang cukai	-	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Meningkatnya keamanan sistem aplikasi pemerintah daerah	-	-	-	59 %	61 %	63 %	65 %	67 %	59 %	61 %	63 %	65 %	67 %	59 %	61 %	63 %	65 %	67 %
6	Persentase personel yang terfasilitasi	-	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	Persentase fasilitas gedung kantor yang terbangun	-	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
8	Persentase terpenuhinya seragam dinas/ atribut dan identitas karyawan	-	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
9	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan	-	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Jombang Tahun 2017-2018

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	1	2	1	2	Anggaran	Realisasi
Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	647.293.000	568.069.000	616.580.000	455.209.826	95.25%	77.80%	(79.224.000)	(161.370.174)
Program kerjasama informasi dengan mas media	951.060.000	857.710.000	927.185.500	828.917.000	97.49%	96.64%	(93.350.000)	(98.268.500)
Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1.422.490.000	3.998.876.850	1.328.326.960	3.491.863.998	93.38%	87.32%	2.576.386.850	2.163.537.038
Program pengembangan data/ informasi/statistik daerah	105.100.000	100.625.000	90.595.500	32.000.000	86.20%	31.80%	(4.475.000.000)	(58.595.500)
Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai	150.000.000	200.000.000	140.335.000	183.710.500	93.57%	91.86%	50.000.000	43.375.500
Program penyelenggaraan persandian daerah	14.500.000	22.675.000	13.015.000	17.523.100	90.38%	77.28%	8.175.000	4.508.100
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	713.992.986	1.045.698.548	655.324.046	926.788.299	91.78%	88.63%	331.705.562	271.464.253

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	1	2	1	2	Anggaran	Realisasi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	73.778.000	690.060.000	64.479.550	568.693.000	87.40%	82.41%	616.282.000	504.213.450
Program peningkatan disiplin aparatur	22.000.000	39.850.000	19.000.000	39.850.000	86.36%	100%	17.850.000	20.850.000
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD	13.153.750	38.100.000	12.693.750	18.791.000	96.50%	49.32%	24.946.250	6.097.250

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan

1. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan serta tingginya jumlah pelanggaran UU ITE;
2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Komunikasi;
3. Terbatasnya SDM bidang Komunikasi dan Informatika;
4. terbatasnya kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang;
5. Keterbatasnya anggaran di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang.

Peluang

1. Dukungan Pemerintah dalam pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas perlengkapan Alat komunikasi;
2. Adanya kesempatan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan bidang Komunikasi dan Informatika;
3. Dukungan anggaran di Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang;
4. Dengan jangkauan komunikasi dan informatika keseluruh pelosok pedesaan diharapkan akan mampu menambah pengetahuan dan wawasan yang merata keseluruh masyarakat sampai kepedesaan dalam rangka mengurangi kesenjangan informasi.

Beberapa hal yang sangat berpengaruh dalam menunjang kelancaran setiap kegiatan dan program yang telah ditetapkan dan dilaksanakan guna mendukung tercapainya sasaran sebagaimana telah diuraikan di atas, antara lain :

1. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
2. Adanya pedoman dan peraturan perundang-undangan yang bisa dijadikan acuan dan mendukung dari pelaksanaan kegiatan;
3. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang memadai;
4. Terpenuhinya kebutuhan anggaran/dana untuk pelaksanaan kegiatan; Koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait yang terbina dengan baik dan harmonis;
5. Pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan terkoordinir dan terencana.

Pada setiap pelaksanaan program dan kegiatan pasti ditemukan adanya hambatan atau kendala. Di bawah ini beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi dalam mencapai target indikator kinerja sasaran antara lain :

1. Perencanaan kegiatan yang disusun masih kurang sistematis, belum terkoordinir dengan baik dan belum komprehensif (mencakup keseluruhan) termasuk data yang belum akurat;
2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai di beberapa kegiatan;
3. Kurang lengkapnya pedoman dan peraturan perundang-undangan yang bisa dijadikan acuan dan mendukung dari pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang;
4. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang belum memadai;
5. Belum maksimalnya dukungan anggaran/dana untuk pelaksanaan kegiatan;
6. Koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait yang belum terbina dengan baik dan harmonis;
7. Pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan belum dilakukan dengan koordinasi dan perencanaan yang baik.

Suatu permasalahan timbul akibat sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pasti akan menemui suatu masalah sehingga diperlukan adanya upaya guna mengatasi keterbatasan/kendala yang timbul. Beberapa alternatif pemecahan masalah terhadap kendala dan hambatan tersebut antara lain :

1. Sangat diperlukan adanya pemenuhan terhadap sarana dan prasarana penunjang kegiatan;
2. Penyediaan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan secara teliti dan lengkap;
3. Sangat diperlukan peningkatan kualitas aparatur pemerintah, misalnya melalui Diklat, Seminar, Studi Banding, Tugas Belajar serta pemilihan mitra kerja yang tepat (berkualitas, profesional dan bertanggungjawab);
4. Pengusulan anggaran/dana untuk setiap kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan pekerjaan maupun kegiatan lainnya yang didukung oleh dasar hukum serta argumentasi yang representatif;
5. Perlu membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain dengan harapan pelaksanaan koordinasi dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2018 - 2023 dapat terlaksana dengan baik.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Website SKPD yang dikembangkan	Peningkatan penyebarluasan informasi SKPD	Pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap tugas pokok dan fungsi SKPD
2	Sarana dan prasarana komunikasi dan informasi masyarakat	Peningkatan sosialisasi pengoptimalan kelompok informasi masyarakat	Belum maksimalnya sosialisasi manfaat pengembangan KIM
3	Aplikasi pelayanan SKPD dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Peningkatan pengembangan SDM dan server dalam pengembangan aplikasi pelayanan	Belum optimalnya SKPD yang terkait dalam pelayanan untuk meningkatkan pelayanan SKPD
4	Kualitas dan kuantitas persandian	Peningkatan pengembangan SDM dan sarana prasarana persandian yang modern	Masih rendahnya SDM dan sistem persandian yang modern

3.2 Telaah Visi, Misi dan Progam Bupati Terpilih

Bupati dan Wakil Bupati Jombang terpilih mempunyai visi pembangunan lima (5) tahun mendatang yaitu **“Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing”**.

Berkarakter artinya, pembangunan bertumpu pada nilai agama dan nilai budaya luhur. Proses pembangunan mengedepankan kejujuran, kesungguhan, kearifan, kegotongroyongan, etos kerja dan keterbukaan, sehingga akan mewujudkan pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Jombang.

Berdaya saing artinya, pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga mampu mengembangkan potensi alam, sosial budaya, infrastruktur, dan networking yang ada. Jika seluruh potensi dapat digunakan secara efektif untuk peningkatan produktivitas, maka Kabupaten Jombang mampu bersaing dengan kabupaten dan kota lain, baik di tingkat lokal, regional, nasional, bahkan internasional.

Sesuai dengan harapan dari visi “**Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing**”, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2018 - 2023 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, antara lain dijelaskan dalam 3 (tiga) misi sebagaimana berikut:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional.

Kami akan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan dan efektif, serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan bebas korupsi. Sistem *perencanaan berbasis elektronik, penganggaran berbasis elektronik serta pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik* akan kami siapkan untuk akuntabilitas pelayanan. Pembuatan identitas penduduk seperti KTP dan KK bisa dilayani di kantor kecamatan untuk mempermudah pelayanan publik. Serta adanya hotline yang bisa menjadi saluran aspirasi masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan yang partisipatif di Kabupaten Jombang.

2. Mewujudkan Masyarakat yang Berkualitas, Religius dan Berbudaya.

Kami akan mengupayakan pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat dengan memberikan perhatian kepada kelompok marginal, seperti para dhuafa (kaum lemah), masyarakat miskin, warga disabilitas, lansia, perempuan dan anak-anak agar semuanya dapat mengakses pendidikan, mengakses layanan kesehatan, dapat menikmati air bersih dan rumah layak huni. Menjaga kelestarian lingkungan hidup juga menjadi perhatian kami. Sehingga masyarakat dapat hidup sehat, cerdas dan aman dari bencana. Kehidupan yang berkualitas akan meningkatkan indeks pembangunan manusia dan indeks pembangunan gender di Kabupaten Jombang.

Dalam kehidupan yang religius, Jombang akan mengukuhkan diri sebagai kota santri. Kami mendukung dan memfasilitasi kegiatan keagamaan yang aman, toleran, rukun dan saling menghormati. Anak-anak juga kita tanamkan pendidikan agama, budi pekerti yang luhur, budaya anti korupsi, dan cinta lingkungan.

Budaya Jombangan juga menjadi ciri khas yang kita jaga dan kembangkan, dalam menjunjung falsafah hidup yang luhur. Tradisi bersih desa, sedekah bumi, nyadran akan menjadi ungkapan rasa syukur kami, yang mengajarkan kebersamaan, kerukunan, saling berbagi dan saling menghormati untuk kebaikan bersama.

3. **Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi Unggulan Lokal dan Industri.**

Kami akan meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian daerah melalui tiga (3) strategi:

- a) **Pengembangan Potensi Lokal** melalui peningkatan nilai tambah produk dan peningkatan akses pasar, baik secara tradisional maupun secara modern;
- b) **Perluasan Kesempatan Kerja** di Kabupaten Jombang melalui pengembangan industri kreatif, pariwisata, serta penyiapan kawasan industri di wilayah utara brantas;
- c) **Peningkatan Infrastruktur** yang mendukung peningkatan pertumbuhan wilayah dan menurunkan disparitas wilayah;

Dalam mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang akan melaksanakan misi kepala daerah pada misi I yakni **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional”**.

Visi berkaitan dengan pandangan kedepan dan menyangkut arah pelaksanaan organisasi pemerintah harus dibawa agar dapat berkarya secara konsisten, antisipasi dan produktif. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh penyelenggara pemerintah. Visi yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jombang harus dicapai dalam tahun 2023, untuk itu RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2018-2023 adalah merupakan penjabaran dan visi, misi dan progam Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah serta RPJM Nasional. Selanjutnya untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya dan dalam rangka mendukung progam-progam Bupati Kabupaten Jombang, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang berpedoman pada visi dan misi Bupati terpilih.

Apabila kita pahami dengan seksama dari visi kepala daerah terpilih, maka kita dapat menarik suatu garis besar bahwa dari visi dikaitkan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Transparan dan Efektif serta Penyelenggaraan Layanan Publik yang Berkualitas sesuai dengan sasaran arah kebijakan Meningkatnya sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk peningkatan standar kualitas pelayanan OPD serta penyebaran informasi pemerintah daerah dengan media informasi yang tepat dan akurat

sehingga bisa diterima dan diakses oleh segenap lapisan masyarakat.

Sedangkan apabila dikaitkan dengan visi berkarakter dan berdaya saing yaitu Program Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik dan Program Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah peningkatan sistem informasi dan pelayanan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan mutu dan kecepatan pelayanan serta keterbukaan informasi dalam indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra

Visi dan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah ***“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***.

Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika, yakni:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019, pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Renstra tahun 2015—2019 akan berfokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, dan digitalisasi siaran televisi.

Tugas & Fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam rencana strategis Kementerian Kominfo tahun 2015-2019, pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan di prioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan dan peningkatan pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan SDM dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Adapun sasaran strategis pembangunan di bidang komunikasi dan informatika meliputi:

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan;
2. Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan;
3. Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman;
4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.

Arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur yaitu “Terwujudnya Penyebarluasan Informasi dan Pelayanan Publik melalui TIK di Jawa Timur”. Misi yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang dengan mengacu misi ke empat Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu “Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik” yang dititikberatkan untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan

tata pemerintahan yang bersih (clean government) serta profesionalisme pelayanan publik.

Rumusan visi tersebut dapat dimengerti melalui makna yang terkandung pada konsep-konsep sebagai berikut :

- *Penyebaran Informasi* memiliki maksud bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang adalah merupakan institusi yang merumuskan, menyusun, memonitoring, mengevaluasi serta memiliki wewenang untuk menyebarluaskan informasi pembangunan serta kegiatan daerah.
- *Pelayanan publik (public service)* memiliki maksud bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika harus mampu memenuhi kebutuhan (*needs*), keinginan (*wants*), dan harapan (*expectation*) masyarakat. Dalam hal ini kebutuhan masyarakat yang harus di utamakan dan di penuhi adalah kebutuhan akan keterbukaan dan kemudahan mendapatkan informasi.

Berdasarkan visi dan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang menetapkan tujuan untuk periode tahun 2018-2023 sejalan dengan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih sebagai berikut :

“Meningkatnya Kualitas Layanan Publik”

Sedangkan upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang merumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas layanan penyebaran informasi, memberdayakan potensi masyarakat serta kerjasama lembaga komunikasi dan informatika.
2. Mengembangkan aplikasi, muatan layanan publik, standarisasi telekomunikasi serta pemanfaatan jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Untuk KLHS Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang tidak memiliki kajian lingkungan hidup terhadap kebijakan rencana dan program daerah yang memiliki dampak lingkungan terhadap isu-isu pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam laporan KLHS RPJMD 2018- 2023.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis dalam **Tata Kelola Pemerintahan** yang akan dihadapi pada rentang waktu 2018-2023 antara lain :

- Pemerintah yang belum mampu menunjukkan kinerja yang optimal dalam peningkatan sektor ekonomi maupun sosial, menimbulkan adanya isu Tuntutan Reformasi birokrasi yang mampu melakukan perubahan sosial ekonomi
- Pemerintahan yang belum mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, sehingga menimbulkan isu tuntutan penciptaan pemerintahan yang dipercaya masyarakat.
- Perlunya penyesuaian kelembagaan yang sesuai dengan RPJMD.
- Perlunya mengoptimalkan Sistem pemerintahan yang integratif
- Manajemen pengelolaan tenaga kerja tidak efektif.

Dalam menindaklanjuti, memperbaiki dan merealisasikan Isu-Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan program dan kegiatan dalam lima tahun ke depan meliputi :

- Memberikan layanan publik melalui antar instansi dengan sistem dan aplikasi. Sistem dibuat oleh OPD terkait, Dinas Komunikasi dan Informatika mengintegrasikan;
- Memberikan informasi publik terkait kegiatan pembangunan melalui radio komunitas, website maupun pertunjukan;
- Mengamankan pengamanan sistem jaringan;
- Mempersiapkan sarana dan prasarana koneksi jaringan mulai dari Kecamatan hingga Kabupaten Jombang;
- Menampilkan data kinerja OPD di Kabupaten Jombang melalui *command center*;
- Memperluas jangkauan radio SJFM untuk menyiarkan kegiatan pembangunan Lingkup Kabupaten Jombang.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Agar tercipta kesatuan pandang dalam rangka melaksanakan misi untuk pencapaian visi Kabupaten Jombang, dirumuskanlah tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika serta mengacu pada strategi pembangunan daerah Kabupaten Jombang sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2018 - 2023.

Tujuan adalah penjabaran dari misi yang merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. Adanya tujuan ini memfokuskan kinerja dari Dinas Komunikasi dan Informatika dan memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan merupakan suatu hal yang akan dicapai atau dihasilkan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam jangka waktu bulanan, triwulan dan tahunan. Sasaran menggambarkan tindakan-tindakan dalam rangka pencapaian tujuan dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup secara efektif dan efisien dengan hasil yang optimal.

Pernyataan tujuan dan sasaran Jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang beserta indikatornya disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Indeks SPBE <i>Predikat Nilai Indeks SPBE</i> <i>1. 4,2 – 5,0 : Memuaskan</i> <i>2. 3,5 - <4,2 : Sangat Baik</i> <i>3. 2,6 - <3,5 : Baik</i> <i>4. 1,8 - <2,6 : Cukup</i> <i>5. < 1,8 : Kurang</i>	Nilai Indeks 2,7 (baik)	Nilai Indeks 2,8 (baik)	Nilai Indeks 3,0 (baik)	Nilai indeks 3,2 (baik)	Nilai Indeks 3,5 (sangat baik)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan yang mengacu pada RPJMD Bupati dan Wakil Bupati Jombang Terpilih tahun 2018 - 2023. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dengan dipertegas adanya arah kebijakan.

1. Peluang (*Opportunities*)

- a. Kepedulian pimpinan terhadap bidang Komunikasi dan Informatika;
- b. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan;
- c. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. Kebutuhan pengembangan muatan e-Government;
- e. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi;
- f. Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- g. Tersedianya perundangan yang mendasari regulasi Bidang Komunikasi dan Informatika;
- h. Tersedianya produk data sektoral.

2. Ancaman (*Threats*)

- a. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik;
- b. Kesenjangan informasi di masyarakat;
- c. Pesatnya perkembangan TIK;
- d. Ketersediaan infrastruktur TIK yang belum merata;
- e. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap TIK;
- f. Bentuk kelembagaan Komunikasi dan Informatika di daerah yang beragam;
- g. Data yang tidak akurat dan tidak terpercaya;
- h. Sulitnya memetakan ketersediaan dan kebutuhan data.

3. Kekuatan (*Strength*)

- a. Tersedianya sumber daya manusia yang cukup;
- b. Tersedianya anggaran;
- c. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

4. Kelemahan (*Weakness*)

- a. Terbatasnya sumber daya manusia yang terampil dan profesional;
- b. Kurangnya kemampuan mengintegrasikan Sistem Informasi dan Database OPD;

- c. Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat;
- d. Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK;
- e. Tugas dan fungsi masih tumpang tindih dengan OPD lain;
- f. Belum adanya tata kelola pengelolaan Data Center.

FAKTOR EKSTERNAL FAKTOR INTERNAL	<u>Kekuatan (Strengths) :</u> a. Tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang cukup; b. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai; c. Tersedianya anggaran.	<u>Kelemahan (Weaknesses) :</u> a. Terbatasnya sumber daya manusia yang terampil dan profesional; b. Kurangnya kemampuan mengintegrasikan Sistem Informasi dan Database OPD; c. Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat; d. Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK; e. Tugas dan fungsi masih tumpang tindih dengan OPD lain; f. Belum adanya tata kelola pengelolaan Data Center.
<u>Peluang (Opportunities) :</u> a. Kepedulian pimpinan terhadap bidang Komunikasi dan Informatika; b. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan; c. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik; d. Kebutuhan pengembangan muatan e-Government; e. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi; f. Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan; g. Tersedianya perundangan yang mendasari regulasi Bidang Komunikasi dan Informatika; h. Tersedianya produk data sektoral.	<u>Strategi SO</u> 1) Dengan adanya SDM, sarana dan prasarana dapat memanfaatkan kemajuan TIK . 2) Dengan tersedianya anggaran dapat mengikuti kemajuan dan perkembangan TIK.	<u>Strategi WO</u> 1) Dengan semakin majunya TIK perlu peningkatan SDM. 2) Optimalisasi sarana dan prasarana informasi untuk meningkatkan kesadaran informasi bagi masyarakat.

<u>Ancaman (Threats) :</u>	<u>Strategi ST</u>	<u>Strategi WT</u>
a. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik; b. Kesenjangan informasi di masyarakat; c. Pesatnya perkembangan TIK; d. Ketersediaan infrastruktur TIK yang belum merata; e. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap TIK; f. Bentuk kelembagaan Komunikasi dan Informatika di daerah yang beragam; g. Data yang tidak akurat dan tidak terpercaya; h. Sulitnya memetakan ketersediaan dan kebutuhan data.	1) Tersedianya SDM, sarana dan prasarana dalam penyampaian informasi untuk menghadapi kemajemukan dan dinamika masyarakat. 2) Adanya SDM, sarana dan prasarana guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi. 3) Tersedianya anggaran akan meningkatkan jaringan informasi.	1) Peningkatan SDM memperkuat jaringan informasi dan komunikasi. 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana untuk meningkatkan kesadaran informasi masyarakat. 3) Optimalisasi Sarana dan Prasarana untuk memperkuat jaringan informasi dan komunikasi

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI :Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing			
MISI :Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Transparan dan Efektif serta Penyelenggaraan Layanan Publik yang Berkualitas	Sasaran 3: Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Strategi 1: Memperkuat dan mengakselerasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang didukung oleh ASN yang profesional guna menciptakan kelembagaan birokrasi berbasis digital yang menciptakan pelayanan masyarakat yang prima.	Arah Kebijakan 1: Perluasan dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang mampu memberi dampak eksternal yang berkelanjutan. Arah Kebijakan 2: Menciptakan desain kelembagaan birokrasi yang suportif terhadap proses terhadap proses bisnis pencapaian sasaran prioritas pembangunan. Arah Kebijakan 3: Mewujudkan pemerintahan yang professional berbasis ASN yang professional dan digitalisasi proses layanan.

BAB VI
RENCANA PROGAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang dalam Rencana Strategis tahun 2018- 2023 merencanakan 9 Program dan 24 Kegiatan yang meliputi indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dijabarkan sebagai berikut :

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Indikator Kinerja : Nilai Evaluasi SAKIP
Target Kinerja : Capaian progam bidang Sekretariat ditargetkan mulai tahun 2019 s/d 2019 adalah 100% terpenuhinya pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.

1. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja : Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.
Target Kinerja : Capaian Kinerja bidang Sekretariat ditargetkan mulai tahun 2019 s/d 2023 adalah pemenuhan 22 jenis rekening kegiatan selama 12 bulan terdiri dari honorarium PNS, honorarium non pns, ATK, belanja alat listrik, belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya, belanja peralatan kebersihan, belanja bahan bakar, belanja kelengkapan komputer, belanja tagihan listrik, air, telepon, dll.

2. PROGAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Indikator Kinerja : Nilai Evaluasi SAKIP
Target Kinerja : Capaian progam bidang Sekretariat ditargetkan mulai tahun 2019 s/d 2023 adalah 100% terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan.

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Indikator Kinerja : Jumlah kendaraan dinas yang diadakan
Target Kinerja : Capaian Kinerja bidang Sekretariat ditargetkan mulai tahun 2019 s/d 2023 adalah terpenuhinya kendaraan dinas yang diadakan.

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Indikator Kinerja : Jumlah kendaraan dinas/kendaraan operasional yang dipelihara

Target Kinerja : Capaian Kinerja bidang Sekretariat ditargetkan mulai tahun 2019 s/d 2023 selama 12 bulan adalah terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas sebanyak 15 unit.

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Indikator Kinerja : Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara

Target Kinerja : Capaian Kinerja bidang Sekretariat ditargetkan mulai tahun 2019 s/d 2023 selama 12 bulan adalah terpenuhinya pemeliharaan service dan pembelian suku cadang AC, PC, Laptop, printer, dan camera.

4. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor

Indikator Kinerja : Jumlah/jenis sarana dan prasarana gedung kantor yang diadakan.

Target Kinerja : Capaian Kinerja bidang Sekretariat ditargetkan mulai tahun 2019 s/d 2023 selama 12 bulan adalah pengadaan perlengkapan kantor.

5. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya

Indikator Kinerja : Jumlah bangunan pendukung yang dipelihara

Target Kinerja : Capaian Kinerja bidang Sekretariat ditargetkan mulai tahun 2019 s/d 2023 untuk 2 gedung pemeliharaan gedung Kominfo dan gedung ex. PMI.

5. Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya

Indikator Kinerja : Jumlah pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya.

Target Kinerja : Capaian Kinerja Sekretariat ditargetkan mulai tahun 2019 s/d 2023 adalah pengadaan PDH, pakaian kerja lapangan, pakaian batik tradisional dan pakaian olah raga untuk pegawai Dinas Kominfo.

3.PROGRAM PERENCANAAN STRATEGIS DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA SERTA KEUANGAN SKPD

Indikator Kinerja : Persentase pengamanan informasi yang dilakukan pengamanan.

Target Kinerja : Capaian program sekretariat ditargetkan mulai tahun 2019 s/d 2023 adalah 100% terpenuhinya dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan.

1. Penyusunan rencana kerja SKPD

Indikator Kinerja : Jumlah dokumen rencana kerja OPD tahunan sebagai rencana program/kegiatan SKPD

Target Kinerja : Capaian Kinerja bidang Sekretariat ditargetkan mulai tahun 2019 s/d 2023 adalah terpenuhinya 2 dokumen rencana kerja SKPD.

2. Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD

Indikator Kinerja : Jumlah laporan capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja SKPD

Target Kinerja : Capaian Kinerja bidang Sekretariat ditargetkan mulai tahun 2019 s/d 2023 adalah terpenuhinyadokumen laporan capaian kinerja SKPD.

3. Penyusunan laporan keuangan SKPD

Indikator Kinerja : Jumlah laporan keuangan OPD tepat waktu

Target Kinerja : Capaian Kinerja bidang Sekretariat ditargetkan mulai tahun 2019 s/d 2023 selama 12 bulan adalah terpenuhinya dokumen laporan keuangan.

4. PROGAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN

Indikator Kinerja : Persentase pengamanan informasi yang dilakukan pengamanan.

Target Kinerja : Capaian progam bidang teknologi informasi dan komunikasi ditargetkan mulai tahun 2019 s/d 2023 adalah 100% terpenuhinya komunikasi berita sandi yang diteruskan kepada instansi penerima.

1. Fasilitasi Penyelenggaraan Persandian Daerah

Indikator Kinerja : Jumlah berita sandi yang diteruskan kepada instansi penerima.

Target Kinerja : Capaian Kinerja bidang Teknologi Informasi Komunikasi ditargetkan mulai tahun 2019 s/d 2023 adalah 396 berita persandian yang diamankan.

5. PROGAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH

Indikator Kinerja : Persentase data sektoral Kabupaten yang dipublikasikan.

Target Kinerja : Capaian progam bidang teknologi informasi dan komunikasi ditargetkan mulai tahun 2019 s/d 2023 adalah 100% terpenuhinya dokumen data sektoral Kabupaten Jombang.

1. Fasilitasi Pengelolaan Data dan Statistik

Indikator Kinerja : Jumlah dokumen data sektoral Kabupaten Jombang.

Target Kinerja : Capaian Kinerja bidang teknologi informasi dan komunikasi ditargetkan mulai tahun 2019 s/d 2023 adalah cetak dan penggandaan data sektoral Kabupaten Jombang dan Sektoral Kecamatan.

6. PROGAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI

- Indikator Kinerja : Persentase informasi perundang-undangan di bidang cukai yang disebarluaskan.
- Target Kinerja : Capaian progam bidang pengelolaan komunikasi dan informasi publik ditargetkan mulai tahun 2019 s/d 2023 adalah 100% terpenuhinya jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi ketentuan di bidang cukai.

1. Penyampaian Informasi Ketentuan Perundang-undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan

- Indikator Kinerja : Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi ketentuan di bidang cukai.
- Target Kinerja : Capaian Kinerja bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik yaituditargetkan mulai tahun 2019 s/d 2023 adalahpublikasi/iklan di mass media dan sosialisasi cukai.

7. PROGAM PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK

- Indikator Kinerja : Persentase publikasi kegiatan pembangunan, kategori predikat PPID, dan persentase KIM yang terbentuk di setiap desa.
- Target Kinerja : Capaian progam bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik ditargetkan mulai tahun 2019 s/d 2023 adalah 100% terpenuhinya publikasi kegiatan pembangunan, kategori predikat PPID, dan persentase KIM yang terbentuk di setiap desa.

1. Fasilitasi Publikasi Informasi Pembangunan Daerah

- Indikator Kinerja : Jumlah dialog interaktif melalui media elektronik.
- Target Kinerja : Capaian Kinerja bidangPengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik ditargetkan mulai tahun 2019 s/d 2023 adalah dilaksanakannya Dialog interaktif warung pojok kebon rojo.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Radio

- Indikator Kinerja : Radius Jangkauan Layanan Siaran Radio di Kabupaten Jombang

Target Kinerja : Capaian Kinerja bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik ditargetkan mulai tahun 2019 s/d 2023 adalah pengadaan untuk peralatan alat pemancar radio SJFM untuk jangkauan layanan siaran radio.

3. Fasilitasi Pengelolaan Pelayanan Informasi

Indikator Kinerja : Jumlah OPD yang mengikuti kegiatan pelatihan Lapor SPAN

Kinerja : Capaian Kinerja bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik ditargetkan mulai tahun 2019 s/d 2023 adalah kegiatan pelatihan Lapor SPAN dan kegiatan ramadhan di SJFM.

4. Fasilitasi Kelompok Informasi Masyarakat

Indikator Kinerja : Jumlah KIM yang terbentuk di setiap desa

Kinerja : Capaian Kinerja bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik ditargetkan mulai tahun 2019 s/d 2023 adalah pembinaan dan pelatihan KIM desa dan mengikuti Pameran Pekan KIM.

6. PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Indikator Kinerja : Persentase koneksi jaringan yang berfungsi dengan baik

Target Kinerja : Capaian program bidang teknologi informasi dan komunikasi ditargetkan mulai tahun 2019 s/d 2023 adalah 100% terpenuhinya koneksi jaringan yang berfungsi dengan baik.

1. Fasilitasi Pengembangan Koneksi Jaringan

Indikator Kinerja : Presentase OPD yang ditingkatkan kualitas dan layanan koneksi pengembangan jaringan dan jumlah penambahan titik koneksi jaringan di area publik.

Target Kinerja : Capaian Kinerja bidang teknologi informasi dan komunikasi ditargetkan mulai tahun 2019 s/d 2023 adalah bertambahnya koneksi jaringan.

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Koneksi Jaringan

Indikator Kinerja : Presentase koneksi jaringan OPD yang terpelihara.

Target Kinerja : Capaian Kinerja bidang teknologi informasi dan komunikasi ditargetkan mulai tahun 2019 s/d 2023 adalah pemeliharaan tower dan penggantian suku cadang.

3. Fasilitasi Pengelolaan Data Center dan Disaster Recovery Center

Indikator Kinerja : Presentase koneksi jaringan OPD yang terpelihara.

Target Kinerja : Capaian Kinerja bidang teknologi informasi dan komunikasi ditargetkan mulai tahun 2019 s/d 2023 adalah ditampilkannya data center untuk menampilkan data di Kabupaten Jombang dalam satu tampilan.

Disaster Recovery Center untuk backup data serta penanggulangan bencana terkait teknologi informasi yang berfungsi untuk mengambil alih fungsi suatu unit ketika terjadi gangguan serius yang menimpa satu atau beberapa unit kerja penting di data pemerintahan, seperti pusat penyimpanan dan pengolahan data dan informasi

4. Fasilitasi Pengelolaan Integrasi Data

Indikator Kinerja : Presentase koneksi jaringan yang berfungsi dengan baik.

Target Kinerja : Capaian Kinerja bidang teknologi informasi dan komunikasi ditargetkan mulai tahun 2019 s/d 2023 adalah pembuatan aplikasi dashboard untuk penghubung antar sistem aplikasi OPD agar bisa saling berinteraksi dan terkait untuk bertukar data yang diperlukan.

6. PROGAM PENGEMBANGAN LAYANAN e-GOVERNMENT

Indikator Kinerja : Persentase sistem aplikasi online.

Target Kinerja : Capaian program bidang layanan e-Government ditargetkan mulai tahun 2019 s/d 2023 adalah 100% terpenuhinya aplikasi/website OPD yang telah diberikan nama sub domain jombangkab.go.id.

1. Fasilitasi Pengembangan Aplikasi dan Ekosistem e-Government

Indikator Kinerja : Jumlah aplikasi/website OPD yang telah diberikan nama sub domain jombangkab.go.id.

Target Kinerja : Capaian Kinerja bidang layanan e-Government ditargetkan mulai tahun 2019 s/d 2023 adalah setiap OPD di Kabupaten Jombang memiliki sub domain jombangkab.go.id

2. Fasilitasi Tata Kelola e-Government

Indikator Kinerja : Jumlah dokumen konsultasi.

Target Kinerja : Capaian Kinerja bidang layanan e-Government ditargetkan mulai tahun 2019 s/d 2023 adalah konsultasi software untuk masterplan TIK.

Tabel 6.1
Rencana Progam, Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan	Sasaran	Kode	Progam dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Progam (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.10.2.10.1.23	Progam Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase koneksi jaringan yang berfungsi dengan baik		100%	1.696.620.000	100%	1.681.123.240	100%	1.869.840.000	100%	1.963.630.000	100%	2.061.593.000	100%	2.061.593.000	Dinas Kominfo	Kab. Jombang
		2.10.2.10.1.23.01	Pemeliharaan rutin/berkala koneksi jaringan	Persentase koneksi jaringan OPD yang terpelihara		100%	991.000.000	100%	1.034.823.240	100%	1.092.000.000	100%	1.146.800.000	100%	1.203.930.000	100%	1.203.930.000	Dinas Kominfo	Kab. Jombang
		2.10.2.10.1.23.02	Fasilitasi pengembangan koneksi jaringan	Persentase OPD yang ditingkatkan kualitas dan layanan koneksi pengembangan jaringan; Jumlah penambahan titik koneksi jaringan di area publik		67% ; 3 titik	242.920.000	68% ; 3 titik	178.600.000	70% ; 3 titik	267.820.000	71% ; 3 titik	281.210.000	73% ; 3 titik	295.270.000	73% ; 3 titik	295.270.000	Dinas Kominfo	Kab. Jombang
		2.10.2.10.1.23.03	Fasilitasi pengelolaan Data Center dan Disaster Recorvery Center (DRC)	Jumlah data center yang terbentuk		1 data center	362.700.000	1 data center	362.700.000	1 data center	399.870.000	1 data center	419.860.000	1 data center	440.853.000	1 data center	440.853.000	Dinas Kominfo	Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Progam dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Progam (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.10.2.10.1.23.04	Fasilitasi pengelolaan integrasi data	Jumlah data aplikasi yang terintegrasi		3 data aplikasi	100.000.000	3 data aplikasi	105.000.000	3 data aplikasi	110.250.000	3 data aplikasi	115.760.000	3 data aplikasi	121.540.000	3 data aplikasi	121.540.000	Dinas Kominfo	Kab. Jombang
		2.15.2.10.1.15	Progam Penyelenggaraan Persandian	Persentase informasi yang dilakukan pengamanan		100%	103.552.500	100%	173.522.000	100%	114.132.000	100%	119.838.000	100%	125.829.000	100%	125.829.000	Dinas Kominfo	Kab. Jombang
		2.15.2.10.1.15.01	Fasilitasi penyelenggaraan persandian daerah	Jumlah komunikasi berita sandi yang diteruskan kepada instansi penerima		396 berita	103.552.500	396 berita	173.522.000	396 berita	114.132.000	396 berita	119.838.000	396 berita	125.829.000	396 berita	125.829.000	Dinas Kominfo	Kab. Jombang
		2.10.2.10.1.24	Progam Pengembangan Layanan E-Government	Persentase sistem aplikasi online		100%	193.756.000	100%	677.040.000	100%	213.675.000	100%	224.357.000	100%	235.576.000	100%	235.576.000	Dinas Kominfo	Kab. Jombang
		2.10.2.10.1.24.01	Fasilitasi pengembangan aplikasi dan ekosistem E-Government	Jumlah aplikasi/website OPD yang telah diberikan nama sub domain jombangkab.go.id		7 sub domain	33.280.000	7 sub domain	404.000.000	7 sub domain	36.750.000	7 sub domain	38.587.000	7 sub domain	40.516.000	7 sub domain	40.516.000	Dinas Kominfo	Kab. Jombang
		2.10.2.10.1.24.02	Fasilitasi Tata Kekola E-Government	Jumlah dokumen konsultasi		1 dokumen	160.476.000	1 dokum en	273.040.000	1 dokume n	176.925.000	1 dokume n	185.770.000	1 dokume n	195.060.000	1 dokum en	195.060.000	Dinas Kominfo	Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Progam dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Progam (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.10.2.10.1.22	Progam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Persentase publikasi kegiatan pembangunan; Kategori predikat PPID; Persentase KIM yang terbentuk di setiap desa		100%	1.385.370.000	100%	1.291.070.000	100%	1.712.895.000	100%	1.837.895.000	100%	1.932.895.000	100%	1.932.895.000	Dinas Kominfo	Kab. Jombang
		2.10.2.10.1.22.01	Fasilitasi publikasi informasi pembangunan-an daerah	Jumlah dialog interaktif melalui media elektronik		24 kali kegiatan	1.012.895.000	36 kali kegiatan	1.012.895.000	36 kali kegiatan	1.012.895.000	36 kali kegiatan	1.012.895.000	36 kali kegiatan	1.012.895.000	36 kali kegiatan	1.012.895.000	Dinas Kominfo	Kab. Jombang
		2.10.2.10.1.22.02	Peningkatan sarana dan prasarana radio	Radius jangkauan layanan siaran radio di Kabupaten Jombang		10 km	194.300.000	15 km	100.000.000	20 km	250.000.000	25 km	300.000.000	30 km	350.000.000	30 km	350.000.000	Dinas Kominfo	Kab. Jombang
		2.10.2.10.1.22.03	Fasilitasi pengelolaan pelayanan informasi	Jumlah OPD yang mengikuti kegiatan Laporan SPAN		75 OPD	85.600.000	75 OPD	85.600.000	75 OPD	150.000.000	75 OPD	200.000.000	75 OPD	220.000.000	75 OPD	220.000.000	Dinas Kominfo	Kab. Jombang
		2.10.2.10.1.22.04	Fasilitasi Kelompok Informasi Masyarakat	Jumlah KIM yang terbentuk di setiap desa		5 desa	92.575.000	21 desa	92.575.000	42 desa	300.000.000	54 desa	325.000.000	66 desa	350.000.000	66 desa	350.000.000	Dinas Kominfo	Kab. Jombang
		2.10.2.10.1.17	Progam Pengembangan-an data/Informasi/statistik Daerah	Persentase data sektoral kabupaten yang dipublikasikan		100%	89.308.750	100%	102.000.000	100%	98.461.000	100%	103.384.000	100%	108.553.000	100%	108.553.000	Dinas Kominfo	Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Progam dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Progam (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.14. 2.10. 1.17. 01	Fasilitasi pengelolaan data dan statistik	Jumlahdokumen data sektoral Kabupaten Jombang		2 dokumen	89.308.750	2 dokum en	102.000.000	2 dokume n	98.461.000	2 dokume n	103.384.000	2 dokume n	108.553.000	2 dokum en	108.553.000	Dinas Kominfo	Kab. Jomba ng
		2.10. 2.10. 1.21	Progam Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Persentase informasi ketentuan perundang-undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/atau		100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	Dinas Kominfo	Kab. Jomba ng
		2.10. 2.10. 1.21. 01	Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi ketentuan dibidang cukai		150 orang	250.000.000	150 orang	250.000.000	150 orang	250.000.000	150 orang	250.000.000	150 orang	250.000.000	150 orang	250.000.000	Dinas Kominfo	Kab. Jomba ng
		2.10. 2.10. 1.01	Progam Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran			1.036.903.750		1.046.905.000		1.036.903.750		1.036.903.750		1.036.903.750		1.036.903.750	Dinas Kominfo	Kab. Jomba ng

Tujuan	Sasaran	Kode	Progam dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Progam (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.10.2.10.1.01.24	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		22 jenis	1.036.903.750	22 jenis	1.046.905.000	22 jenis	1.036.903.750	22 jenis	1.036.903.750	22 jenis	1.036.903.750	22 jenis	1.036.903.750	Dinas Kominfo	Kab. Jombang
		2.10.2.10.1.02	Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan			666.371.000		414.921.000		547.871.000		547.871.000		547.871.000		547.871.000	Dinas Kominfo	Kab. Jombang
		2.10.2.10.1.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan		3 unit	60.000.000	1 unit	60.000.000	1 unit	20.000.000	1 unit	20.000.000	1 unit	20.000.000	1 unit	20.000.000	Dinas Kominfo	Kab. Jombang
		2.10.2.10.1.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/kendaraan operasional yang dipelihara		15 unit	65.100.000	15 unit	75.100.000	15 unit	65.100.000	15 unit	65.100.000	15 unit	65.100.000	15 unit	65.100.000	Dinas Kominfo	Kab. Jombang
		2.10.2.10.1.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara		100 unit	48.821.000	100 unit	51.821.000	100 unit	48.821.000	100 unit	48.821.000	100 unit	48.821.000	100 unit	48.821.000	Dinas Kominfo	Kab. Jombang
		2.10.2.10.1.02.46	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah/jenis sarana dan prasarana gedung kantor yang diadakan		8 jenis	265.500.000	8 jenis	153.500.000	8 jenis	193.000.000	8 jenis	193.000.000	8 jenis	193.000.000	8 jenis	193.000.000	Dinas Kominfo	Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Progam dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Progam (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.10. 2.10. 1.02. 47	Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukung-nya	Jumlah bangunan pendukung yang dipelihara		2 gedung	172.450.000	2 gedung	0	2 gedung	172.450.000	2 gedung	172.450.000	2 gedung	172.450.000	2 gedung	172.450.000	Dinas Kominfo	Kab. Jombang
		2.10. 2.10. 1.02. 64	Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya	Jumlah pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya		165 stel	54.500.000	127 stel	74.500.000	127 stel	48.500.000	127 stel	48.500.000	127 stel	48.500.000	127 stel	48.500.000	Dinas Kominfo	Kab. Jombang
		2.10. 2.10. 1.07	Progam Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan		100%	36.000.000	100%	36.000.000	100%	36.000.000	100%	36.000.000	100%	36.000.000	100%	36.000.000	Dinas Kominfo	Kab. Jombang
		2.10. 2.10. 1.07. 02	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja OPD tahunan sebagai rencana progam/kegiatan SKPD		2 dokumen	15.000.000	2 dokumen	15.000.000	2 dokumen	15.000.000	2 dokumen	15.000.000	2 dokumen	15.000.000	2 dokumen	15.000.000	Dinas Kominfo	Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Progam dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Progam (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.10.2.10.1.07.03	Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja SKPD		1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	15.000.000	Dinas Kominfo	Kab. Jombang
		2.10.2.10.1.07.04	Penyusunan laporan keuangan SKPD	Jumlah keuangan OPD tepat waktu		1 dokumen	6.000.000	1 dokumen	6.000.000	1 dokumen	6.000.000	1 dokumen	6.000.000	1 dokumen	6.000.000	1 dokumen	6.000.000	Dinas Kominfo	Kab. Jombang

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Beberapa syarat dalam menentukan indikator kinerja adalah diantaranya:

1. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.
2. Dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yaitu dua atau lebih mengukur indikator kinerja mempunyai kinerja yang sama.
3. Relevan, artinya indikator kinerja harus menangani aspek-aspek obyektif yang relevan.
4. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil manfaat, dan dampak serta proses.
5. Fleksibel dan sensitif terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan

6. Efektif, artinya data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisa dengan biaya yang tersedia.

Sebagaimana Visi Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 "**Bersama Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing**", Misi Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional.**

Kami akan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan dan efektif, serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan bebas korupsi. Sistem *perencanaan berbasis elektronik, penganggaran berbasis elektronik serta pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik* akan kami siapkan untuk akuntabilitas pelayanan. Pembuatan identitas penduduk seperti KTP dan KK bisa dilayani di kantor kecamatan untuk mempermudah pelayanan publik. Serta adanya hotline yang bisa menjadi saluran aspirasi masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan yang partisipatif di Kabupaten Jombang.

- 2. Mewujudkan Masyarakat yang Berkualitas, Religius dan Berbudaya.**

Kami akan mengupayakan pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat dengan memberikan perhatian kepada kelompok marginal, seperti para dhuafa (kaum lemah), masyarakat miskin, warga disabilitas, lansia, perempuan dan anak-anak agar semuanya dapat mengakses pendidikan, mengakses layanan kesehatan, dapat menikmati air bersih dan rumah layak huni. Menjaga kelestarian lingkungan hidup juga menjadi perhatian kami. Sehingga masyarakat dapat hidup sehat, cerdas dan aman dari bencana. Kehidupan yang berkualitas akan meningkatkan indeks pembangunan manusia dan indeks pembangunan gender di Kabupaten Jombang.

Dalam kehidupan yang religius, Jombang akan mengukuhkan diri sebagai kota santri. Kami mendukung dan memfasilitasi kegiatan keagamaan yang aman, toleran, rukun dan saling menghormati. Anak-anak juga kita tanamkan pendidikan agama, budi pekerti yang luhur, budaya anti korupsi, dan cinta lingkungan.

Budaya Jombang juga menjadi ciri khas yang kita jaga dan kembangkan, dalam menjunjung falsafah hidup yang luhur. Tradisi bersih desa, sedekah bumi, nyadran akan menjadi ungkapan rasa syukur kami, yang

mengajarkan kebersamaan, kerukunan, saling berbagi dan saling menghormati untuk kebaikan bersama.

3. Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi Unggulan Lokal dan Industri.

Kami akan meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian daerah melalui tiga (3) strategi:

- d) **Pengembangan Potensi Lokal** melalui peningkatan nilai tambah produk dan peningkatan akses pasar, baik secara tradisional maupun secara modern;
- e) **Perluasan Kesempatan Kerja** di Kabupaten Jombang melalui pengembangan industri kreatif, pariwisata, serta penyiapan kawasan industri di wilayah utara brantas;
- f) **Peningkatan Infrastruktur** yang mendukung peningkatan pertumbuhan wilayah dan menurunkan disparitas wilayah;

Dari penjabaran di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang yang mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional
- Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Transparan dan Efektif serta Penyelenggaraan Layanan Publik yang Berkualitas
- Sasaran : Meningkatnya Kualitas Layanan Publik

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang telah menetapkan indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, baik pencapaian terhadap indikator kinerja utama (IKU) maupun indikator hasil yang termuat dalam program-program yang akan dilaksanakan. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang dengan pemerintah, dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKJ tahunan dan LKJ lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah.

Tabel 7.1

INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD KAB. JOMBANG TAHUN 2018-2023

No	Indikator Tujuan	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Komunikasi dan Informatika	81,10 (baik)	76,65 (baik)	78,65 (baik)	80,76 (baik)	82,98 (baik)	85,31 (baik)	85,31 (baik)

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018–2023 merupakan rencana yang disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan dalam kurun waktu lima tahun untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dibidang komunikasi dan infomatika.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini harus dapat dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga seluruh komponen organisasi harus ikut terlibat dan bertanggungjawab dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu sumber daya manusia merupakan komponen organisasi yang sangat vital dan berfungsi sebagai penentu utama dalam mencapai tujuan yang harus dikelola secara profesional dan proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur yang tepat.

Akhir kata, semoga Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang ini dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka terwujudnya *good governance* guna menuju terwujudnya masyarakat yang mandiri dan beretika melalui komunikasi dan informatika.

Jombang, 10 Oktober 2018

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN JOMBANG**



BUDI WINARNO, S.T., M.Si.
Pembina
NIP. 19741001 199901 1 001